

Judul : Efisiensi pengelolaan data: Baleg ingin cepat tuntaskan RUU SDI  
Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 5

## Efisiensi Pengelolaan Data Baleg Ingin Cepat Tuntaskan RUU SDI

FOTO: TEDY KROENHARDT/ID



Martin Manurung

BADAN Legislasi (Baleg) DPR ingin ngebut menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Beleid ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan data nasional yang berdampak pada penghematan anggaran negara.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyampaikan, substansi pembahasan RUU SDI telah matang setelah Baleg DPR menyerap berbagai masukan dari Pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Karena itu, pembahasan beleid ini dapat segera dituntaskan sehingga manfaat integrasi data nasional dapat segera dirasakan dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah.

"Percepatan RUU itu dibutuhkan agar Pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis," ujar Martin di Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.

Diketahui, RUU SDI saat ini tengah dalam tahap penyusunan dan pembahasan intensif oleh Baleg DPR. Tujuannya untuk meningkatkan status kebijakan yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi sebuah undang-

undang. Beleid ini didorong segera diselesaikan untuk mewujudkan tata kelola data Pemerintah yang terintegrasi, akurat, dan berkeadilan.

Martin melanjutkan, keberadaan aturan baru ini berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan data nasional yang berdampak pada penghematan anggaran negara. "Berapa ratus triliun yang akan dihemat oleh negara kalau kita selesaikan RUU SDI ini," ucap politisi Nasdem ini.

Martin menilai, sistem satu data akan mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Sehingga mampu mengendalikan inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok. "Jadi harga bahan pokok bisa lebih baik," ucap anggota Komisi XI DPR ini.

Anggota Baleg DPR Eric Hermawan menambahkan, RUU SDI akan mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator pengelolaan data nasional. Keberadaan badan tersebut penting untuk memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan efektif dalam mendukung integrasi data nasional.

"Dalam undang-undang perlu namanya pembentukan badan dan organisasi. Di dalam aturan itu perlu ada pengampu sehingga akan bentuk Badan Satu Data," ujar Eric di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Eric, pembentukan Badan Satu Data bukan berarti membangun organisasi baru dari nol. Sebaliknya, badan tersebut dapat diisi oleh perwakilan atau pengampu dari kementerian dan lembaga yang selama ini mengelola data sehingga koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih efektif. ■ TIF